



Dugaan Penyelewengan PHR Badung

Kadispenda Adi Arnawa Diperiksa Kejati

Denpasar (Bali Post) -

Informasi adanya pemeriksaan pejabat di Pemkab Badung setelah pihak kejaksaan memeriksa sekitar sepuluh orang saksi, benar adanya. Senin (25/5) kemarin, penyidik Kejati Bali memanggil dan memeriksa Kadispenda Badung Adi Arnawa. Dia dimintai keterangan atas dugaan penyimpangan pembagian Pajak Hotel dan Restoran (PHR) Kabupaten Badung ke kabupaten se-Bali.

Pria yang digadang-gadang sebagai bakal calon Bupati Badung tersebut tiba di kejaksaan sekitar pukul 11.45 wita. Setibanya di kantor korps pimpinan Bambang Momock Sumiarso itu, Adi Arnawa yang membawa map langsung naik ke lantai dua ruang pemeriksaan. "Dia diperiksa Ketut Yasa bersama penyidik Made Tangkas," ujar salah seorang petugas kejaksaan.

Pemeriksaan Adi Arnawa memang tidak begitu lama seperti halnya pemeriksaan saksi-saksi lain yang biasanya berlangsung dari pagi hingga sore. Namun untuk Kadispenda Badung ini, pemeriksaan

hanya sampai pukul 13.15 wita, karena dia keluar dan turun sampai lobi kejaksaan sekitar pukul 13.20 wita.

Salah seorang jaksa penyidik, Made Tangkas, membenarkan diperiksanya Kadispenda Adi Arnawa. "Dia sudah datang dan langsung diperiksa. Hanya satu saksi yang diperiksa dari dua orang yang kami panggil," sebutnya.

Tangkas mengatakan, Adi Arnawa yang masih berstatus

saksi ini menyerahkan data PHR tahun 2014. Ketika ditanya mengapa pemeriksaanya cepat, Tangkas mengatakan bahwa Adi Arnawa untuk sementara tidak terlibat dalam penyertaan PHR ke kota-kota yang mendapatkan bagian. "Tetapi nanti jika ada atau ditemukan kesaksian yang menyatakan saksi Adi Arnawa ada dalam PHR ini, kita akan panggil kembali yang bersangkutan," sebutnya.



Bali Post/ist

DI KEJATI - Adi Arnawa saat naik ke lantai dua gedung Kejati Bali, Senin (25/5) siang kemarin.

Edisi : Selasa, 26 Mei 2015
Hal : 3



Bali Post



Sementara itu, Adi Arnawa yang dimintai konfirmasi mengatakan dia datang ke kejaksaan untuk membawa data. "Saya datang ke Kejati untuk menyerahkan data pendapatan saja. Saya serahkan dokumen (pendapatan) karena itu kan bagian saya," jelasnya.

Bagaimana soal pendistribusian PHR ke daerah atau kabupaten/kota? "Maaf, itu bukan bagian saya, itu Bagian Keuangan. Itu saja ya," tandas pria yang belakangan banyak dibicarakan akan maju menjadi calon Bupati Badung tersebut.

Sebagaimana diketahui, kasus ini awalnya dibongkar anggota Dewan Badung, Nyoman Sentana. Setelah memeriksa pemberi informasi, penyidik dari kejaksaan terlebih dahulu memeriksa dua orang saksi. Saksi yang dipanggil adalah Kasubag Keuangan Bangli I Ketut Nurjana, S.E. dan Kasubag Keuangan Tabanan Wayan Arimbawa. Dua daerah tersebut menerima kucuran dana, yang sedianya untuk pengelolaan pengembangan pariwisata.

Sementara Sentana sendiri sudah diperiksa. Tim jaksa

penyelidik yang memeriksa adalah Made Tangkas, Purwanti Murtiasih, Ketut Yasa dan Made Suasti Ariaai. Kala itu, Sentana dimintai keterangan serta membawa dukumen-dukumen menyangkut adanya dugaan penyelewengan pembagian dana PHR Badung ke-nam kabupaten/kota se-Bali. Dewan Badung itu menyampaikan, pembagian PHR Badung sebaiknya dihentikan saja karena kabupaten/kota yang diberikan pembagian PHR yang didapat di Badung, ternyata tidak sesuai dengan peruntukannya. Bagi-bagi PHR itu sebenarnya untuk mendukung pariwisata di kabupaten/kota lainnya, namun ternyata malah digunakan keperluan lain yang bukan menunjang sarana dan prasarana pariwisata.

"Pembagian yang diambil dari APBD Badung 2014 ini, karena tidak sesuai dengan peruntukannya, jelas merupakan penyimpangan. Hal itu juga tidak sesuai dengan surat kesepakatan bersama di luar perda, bahwa dana bagi hasil itu hanya untuk pariwisata," papar Sentana kala itu. (kmb37)

Edisi : Selasa, 26 Mei 2015

Hal : 3



Kasus GOR Nusa Penida

Kejari Bidik Dua Pejabat Klungkung

Semarang (Bali Post) -

Dari 12 saksi yang sudah diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung, dua di antaranya berstatus pejabat setingkat kepala SKPD di jajaran Pemkab Klungkung. Dua pejabat yang dibidik Kejari tersebut masih berstatus sebagai saksi dalam pengungkapan kasus korupsi Gelanggang Olahraga (GOR) Nusa Penida. Meski telah mengantongi dua barang bukti untuk menjerat para pelaku, Kejari masih menunggu besar kerugian negara untuk meningkatkan status kasus menjadi penyidikan.

Kepala Kejari Klungkung Totok Bambang Sapto Dwijo saat didampingi Kepala Cabang Kejari Nusa Penida I Dewa Made Mertayasa mengungkapkan, pihaknya telah memeriksa sedikitnya 12 saksi terkait dengan kasus GOR Nusa Penida. Terkait dengan saksi tambahan, pihaknya mengaku masih melakukan pemeriksaan. "Saya masih melakukan pemeriksaan saksi saat ini," jelas Dewa Mertayasa, Senin (25/5) kemarin.

Saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut adalah orang-orang yang terlibat dalam penyelenggaraan pembangunan GOR Nusa Penida. Selain orang yang ada di dalam Camat Nusa Penida, sejumlah saksi juga diperiksa dari kalangan pejabat Pemkab Klungkung yang bertugas saat pembangunan GOR Nusa Penida. Saksi yang diperiksa mulai dari pimpinan proyek,

penanggung jawab, perencanaan, bendahara, kepanitiaan dan sejumlah saksi lainnya. "Pembangunan menggunakan bansos dan hibah. Semestinya yang mengelola dari unsur masyarakat. Tapi dalam hal ini ada dari pemerintah terlibat," ujarnya.

Pihaknya juga telah memegang dua alat bukti kuat untuk mengungkap kasus proyek yang telah menghabiskan anggaran sekitar Rp 2,3 miliar tersebut. Dana ini bersumber dari APBN Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2009 sebesar Rp 1,5 miliar. Kemudian tahun 2010 dari APBD Provinsi Bali sebesar Rp 200 juta, APBD Kabupaten Klungkung Rp 65 juta dan APBD Perubahan Rp 500 juta. Dugaan kasus korupsi tersebut timbul karena bangunan GOR belum juga selesai. Bahkan, realisasi proyeknya tidak lebih dari 70 persen.

Terkait dengan tindak lanjut kasus GOR Nusa Penida yang terkesan lambat, Totok Bambang mengungkapkan karena kurangnya tenaga jaksa. Proses penyelidikan baru bisa diselesaikan setelah kasus yang lainnya berhasil dibuktikan. (dwa)

Edisi : Selasa, 26 Mei 2015

Hal : 16



Kasus Perjalanan Dinas di Denpasar

Kejari Periksa PPTK dan Mantan Kasubag Kerja Sama

Denpasar (Bali Post) -

Pemeriksaan saksi-saksi atas dugaan penyimpangan penggunaan anggaran perjalanan dinas di DPRD Kota Denpasar, terus digenjot Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar. Senin (25/5) kemarin, dua saksi yang diperiksa adalah pejabat teknis Sekretariat Dewan.

Mereka adalah Kabag Perundang-undangan yang juga Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di DPRD Kota Denpasar Gusti MP dan mantan Kasubag Kerja Sama dan Fasilitas DPRD Kota Denpasar yang saat ini Kepala UPT Pengelola Gedung Sewaka Dharma, Gede WK.

Pantauan di kejaksaan,

MP diperiksa di lantai dua Kejari Denpasar, dengan jaksa pemeriksa Luga Herlianto. Sedangkan Gede WA diperiksa di Posko Bantuan Hukum Kejari Denpasar. Kedua saksi tersebut tiba di kantor kejaksaan di Jalan P.B. Sudirman Denpasar pagi kemarin dan mulai menjalani pemeriksaan pukul 09.00 wita. Informasi

yang didapat, saksi dari PPTK membawa tambahan data sebanyak dua kardus. Data tersebut berkaitan dengan proses teknis pelaksanaan perjalanan dinas tahun 2013. Isi data itu, dari proses penunjukan travel yang menjadi rekanan sampai rekap laporan penggunaan anggaran.

Hal tersebut dibenarkan Kasi Intel Kejari Denpasar, Syahrir Sagir. Dia mengatakan, tambahan data itu bisa membantu penyidik dalam menelusuri dan membongkar penggunaan anggaran perjalanan dinas di Pemkot

Denpasar. "Banyak yang kami harus perdalam dan konfirmasi ulang. PPTK akan kami panggil ulang dan dilakukan pemanggilan, Jumat (29/5) ini," katanya.

Informasi dari kejaksaan, disebutkan pula bahwa dari data yang didapat, yang menyangkut besaran anggaran yang digunakan adalah perjalanan dinas ke luar negeri. "Ya, nilainya bisa Rp 500 juta," sebut Syahril. Selain itu, ada juga soal hubungan antara penyelenggara anggaran dengan peserta perjalanan dinas, yakni dari anggota DPRD.

Pemeriksaan lainnya, yakni KW, dimintai keterangan berkaitan tentang pengetahuan saksi soal hubungan DPRD dengan tujuan dari perjalanan dinas serta penggunaan berbagai fasilitas dan anggaran tersebut. Untuk mendalami pemanfaatan APBD yang digunakan oleh anggota DPRD, kata Syahrir, pada Selasa (26/5) hari ini akan dipanggil pejabat dari Bagian Keuangan Sekretariat Dewan. "Kami selanjutnya panggil Kabag Keuangan dan Kasubagnya," sebut Kasi Intel Syahrir Sagir. (kmb37)

Edisi : Selasa, 26 Mei 2015

Hal : 3



Pansus Aset DPRD Bali Pertanyakan

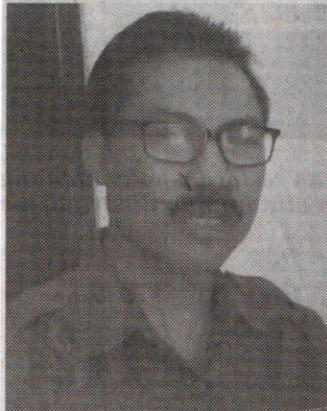
131 Bidang Tanah

Hanya Hasilkan

Rp 7 Juta Setahun

Negara (Bali Post) -

Masalah aset setiap tahun menjadi temuan BPK baik di Provinsi Bali maupun di kabupaten. Hal ini yang menjadi perhatian serius dari DPRD Bali dengan membentuk pansus aset. Pansus Aset DPRD Provinsi Bali dipimpin Wayan Gunawan dengan beberapa anggota, mengajak Biro Aset Provinsi, Senin (25/5) mengadakan tatap muka dengan Sekda Jembrana dan Asisten I Sekda serta jajaran terkait Pemkab yang membidangi masalah aset.



Bali Post/wit

Wayan Gunawan

Dalam pertemuan tersebut terungkap dari 131 bidang tanah yang sudah ada surat izin mengelola (SIM) aset Provinsi Bali hanya menghasilkan atau mendapatkan retribusi Rp 7 juta setahun. Nilai ini menurut Gunawan sangat minim dan harus ditingkatkan. "Nilai ini sangat mengejutkan kami karena sangat rendah karena hanya mampu menghimpun Rp 7 juta setahun dari 131 SIM. Ini

yang harus disikapi ke depan sehingga bisa lebih maksimal untuk pendapatan dari pengelolaan aset," jelasnya.

Gunawan mengatakan memang pengelolaan aset/lahan milik Pemprov ini tergantung dengan kelas dan kualitas tanah dan tarifnya juga berbeda. "Ini tugas pansus ke depan untuk membuat regulasi yang jelas untuk meningkatkan kinerja aset. Apalagi selama ini NJOP dengan retribusi sering nyalir dan nilai aset tidak sesuai dengan kontribusi. Selain itu pemanfaatan juga belum didukung dokumen yang ada," jelas Gunawan.

Pendataan aset ke depan katanya harus berkelanjutan. Di wilayah Provinsi Bali harusnya tidak ada tanah yang tidak bertuan. Namun, anehnya yang sudah bersertifikat saja susah ketika dicari apalagi yang belum bersertifikat. Ke depan menurutnya juga harus ditentukan yang mengelola aset khususnya yang membutuhkan atau kurang mampu, namun memiliki kemampuan menggarap

Edisi : Selasa, 26 Mei 2015

Hal : 14



Bali Post/wit

PANSUS - Pansus aset DPRD Bali ketika melakukan pertemuan dengan jajaran Pemkab Jembrana membahas pengelolaan dan pemanfaatan aset Provinsi Bali.

dengan melakukan pemberdayaan kepada mereka. Sehingga pemanfaatannya lebih maksimal. Karena fungsi aset selain untuk pelayanan juga pemanfaatan yang maksimal. "Jadi ke depan kriteria penggarap juga perlu ditentukan," tandasnya.

Sementara itu Kabid Non Pajak Dispenda Jembrana Oka Nadiani didampingi Sekda Gede Gunadnya mengatakan yang menjadi acuan dalam penentuan besaran tarif dan retribusi SIM yaitu Peraturan Gubernur Bali No. 41 tahun 2012 tentang

perubahan atas peraturan No 3/2011 tentang retribusi jasa usaha. Dimana untuk Jembrana masuk aset/lahan kelas IV dengan besaran tarif Rp 10. Dari retribusi yang diterima 40 persen masuk kas daerah dan yang 60 persen ke kas provinsi. (wit)

Edisi : Sabtu, 26 Mei 2015

Hal : 14